

STATUS PERTEMBAKAUAN NASIONAL

Agus Hasanuddin Rachman

Direktorat Budi Daya Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan

ABSTRAK

Rata-rata luas areal pertanaman tembakau di Indonesia sekitar 200 ribu hektar per tahun. Dari luas tersebut, sebagian besar (48%) berada di Provinsi Jawa Timur, kemudian sekitar 24% berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sisanya tersebar di provinsi lainnya. Peran komoditas tembakau dan industri hasil tembakau sangat besar dalam menyumbang pendapatan nasional dan penyedia lapangan kerja. Penerimaan negara tahun 2007 sebesar Rp42 triliun dan besarnya devisa Rp1,9 triliun. Tenaga kerja yang dapat terserap mulai dari petani tembakau sampai dengan tenaga jasa transportasi rokok sekitar 6,4 juta tenaga kerja. Kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam agribisnis tembakau adalah belum tepatnya waktu tanam, benih unggul bermutu, dan pemilihan lahan yang tidak sesuai untuk memperoleh hasil dan mutu tinggi. Sedangkan kendala-kendala nonteknis meliputi kampanye antirokok, pergeseran selera konsumen, meningkatnya harga bahan bakar minyak tanah (BBMT). Strategi untuk menanggulangi permasalahan dilakukan dengan menetapkan kebijakan dasar dan operasional. Kebijakan dasar diarahkan untuk mengatur atau memfasilitasi pengembangan jenis-jenis tembakau berdasarkan kegunaannya. Langkah-langkah operasional yang diupayakan adalah diversifikasi usaha tani, diversifikasi produk, dan kemitraan antara petani dengan pengelola tembakau dan atau industri rokok.

Kata kunci: Indonesia, tembakau, peran, kendala, penanggulangan

STATUS OF INDONESIAN TOBACCO

ABSTRACT

The average of tobacco land area in Indonesia is about 200,000 ha per year. The largest area is located in East Java Province (48%), and 24% of the total tobacco land area is in West Nusa Tenggara Province, and the rest is spread out in other provinces. The roles of tobacco and industrial of tobacco products are important as sources of national income (Rp42 billion of tax income and Rp1.9 billion from export value income) and as provider of employment (6.4 employees). The problems of tobacco agribusiness are categorized into two types, namely technically (on-farm) and non-technically (off-farm). Technical problems include inappropriate planting time, poor tobacco varieties, and unsuitable tobacco land. Nontechnical problems are antismoking campaigns, the change of smoker preference to light taste cigarettes, and increasing price of fuel for tobacco processing. Strategies to minimize the problems are focused in establishing basic and operational regulations. Basic regulations are driven to arrange or to facilitate tobacco extension based on tobacco types and functions (such as used for keretek cigarette blends or for cigar materials). Operational regulations is set up as a basic of operational strategies which include diversification of tobacco farming systems, diversification of tobacco products, and mutual partnership between farmers and cigarette industries.

Key words: Indonesia, tobacco, role, problem, and strategy

PENDAHULUAN

Tembakau adalah tanaman introduksi, yang berasal dari daerah Amerika Latin. Di Indonesia,

jenis-jenis tembakau yang dibudidayakan sangat banyak. Sebagian sudah beradaptasi dan berkembang di suatu daerah, sehingga tembakau tersebut dikenal sesuai dengan nama daerah pengembang-

annya, seperti tembakau selopuro, tembakau kendal, tembakau temanggung, tembakau madura, dan tembakau paiton. Namun demikian berdasarkan waktu panennya, secara umum jenis-jenis tembakau dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tembakau voor-oogst (tembakau yang dipanen sebelum musim hujan), dan tembakau na-oogst (tembakau yang dipanen setelah musim hujan). Sedangkan penggolongan berdasarkan kegunaannya, maka jenis-jenis tembakau dikenal dengan tembakau bahan baku rokok keretek, bahan baku rokok putih, cerutu, dan tembakau susur.

Rata-rata luas areal tembakau dari tahun 2001–2006 sekitar 200 ribu hektar. Dari luas tersebut, sebagian besar (48%) berada di Provinsi Jawa Timur, kemudian sekitar 24% berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sisanya tersebar di provinsi lainnya. Bila dilihat dari perkembangan luas areal dari tahun 2001 sampai 2006 diketahui bahwa terdapat kecenderungan penurunan luas areal. Penurunan areal tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan tembakau oleh pabrik rokok dan eksportir tembakau. Perkembangan areal, produksi, dan kegunaan jenis-jenis tembakau di Indonesia disajikan pada Tabel 1. Sedangkan pada Tabel 2 disajikan rata-rata luas areal, produksi, dan petani yang terlibat dalam usaha pengembangan tembakau di Indonesia.

Secara umum, dalam makalah ini diuraikan peran tembakau dalam bidang sosial ekonomi, permasalahan dalam agribisnis tembakau, kebijakan yang dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan, dan langkah-langkah operasional yang diperlukan.

PERAN TEMBAKAU DAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU (IHT)

Peran Dalam Perekonomian Nasional

Tembakau adalah komoditas yang bernilai ekonomis tinggi. Sebagai bahan baku yang dibutuhkan oleh industri rokok dan cerutu, maka peran

tembakau dalam perekonomian nasional sangat tinggi. Sumber-sumber penerimaan negara yang berasal dari tembakau dan industri hasil tembakau berupa cukai dan devisa ekspor. Cukai berasal dari pajak penjualan rokok, sedangkan devisa berasal dari pajak ekspor tembakau atau rokok. Penerimaan negara dari cukai dari tahun 2001 sampai 2006 terus meningkat. Pada tahun 2001 besarnya cukai yang diterima negara adalah Rp17,6 triliun, kemudian meningkat pada tahun 2003 dan 2006, masing-masing menjadi Rp26,1 triliun dan Rp37,7 triliun. Sedangkan target penerimaan negara pada tahun 2007 adalah sebesar Rp42 triliun.

Besarnya penerimaan negara yang berasal dari devisa setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2001 besarnya devisa adalah US\$267.741 ribu. Namun demikian pada tahun 2003 besarnya devisa menurun menjadi US\$203.064 ribu. Devisa ini meningkat lagi pada tahun 2005 menjadi US\$219.040 ribu.

Selain dari cukai dan devisa yang memberi peran terhadap pendapatan negara, tembakau dan industri hasil tembakau juga mempunyai kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti tumbuhnya warung, pedagang eceran, dan industri penunjang lainnya (seperti tali, keranjang tembakau, tikar untuk membungkus tembakau). Tentunya besarnya kontribusi terhadap PAD pada masing-masing sentra produksi ini akan ditentukan oleh jenis tembakau dan luas areal pengembangannya. Namun demikian informasi kuantitatif peran tembakau dan industri hasil tembakau terhadap perekonomian daerah belum tersedia.

Peran Dalam Bidang Sosial dan Budaya

Sebagai komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, maka pengelolaan tanaman tembakau dilakukan dengan sangat intensif, sehingga banyak melibatkan tenaga kerja mulai dari pembibitan, tanam, panen sampai prosesing. Demikian juga industri rokok, sangat banyak melibatkan tenaga ker-

Tabel 1. Areal, produksi, dan kegunaan jenis-jenis tembakau di Indonesia 2001–2006

No	Jenis tembakau	2001		2002		2003		2004		2005		2006		Rata-rata		Kegunaan	
		Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)	Areal (ha)	Produksi (ton)		
I	Voor-oogst																
	1	Virginia	43 177	47 659	39 177	40 648	27 389	47 767	26 723	42 828	26 862	46 159	26 856	44 052	34 562	44 758	Rokok putih (70%), rokok keretek (30%)
	2	Rakyat	173 695	118 660	176 701	123 201	201 934	130 286	150 344	98 805	141 063	87 252	141 053	90 228	155 661	108 075	Rokok keretek
	3	Lumajang	250	174	215	148	323	199	540	432	336	316	336	316	316	330	Susur (<i>chewing</i>)
4	White Burley	-	-	-	-	1 917	2 460	1 806	3 369	3 518	6 565	3 518	6 565	2 301	3 160	Rokok putih	
II	Na-oogst																
	1	Deli	2 923	1 688	2 900	1 700	2 900	1 700	2 424	1 259	2 424	1 700	2 736	1 470	2 507	1 586	Cerutu
	2	Vorstenlanden	975	1 268	825	565	764	904	706	577	660	838	660	838	758	832	Cerutu
3	Besuki NO	11 807	12 000	12 371	16 854	13 995	14 834	11 634	11 634	5 020	7 130	5 020	9 561	9 597	10 940	Cerutu	

Tabel 2. Jumlah petani (KK) yang terlibat dalam budi daya tembakau

Tahun	Luas areal (ha)	Produksi (ton)	Jumlah petani (KK)
2001	232 827	181 469	931 308
2002	229 318	181 433	917 272
2003	246 331	196 457	985 324
2004	194 177	158 904	776 708
2005	179 877	147 712	719 508
2006	180 189	151 707	720 756
Rata-rata	210 453	169 614	841 813

ja. Bidang yang terkait dengan industri tembakau antara lain: cengkeh, penjualan rokok, percetakan, dan transportasi, yang semuanya itu menyerap tenaga kerja yang banyak. Tenaga kerja yang dapat terserap mulai dari petani tembakau sampai dengan tenaga jasa transportasi rokok sekitar 6,4 juta tenaga kerja (Tabel 3).

Tabel 3. Tenaga kerja yang terserap pada masing-masing bidang pertembakauan, industri rokok, dan industri sampingan

Jenis profesi	Jumlah tenaga kerja (KK)
Petani tembakau	2 300 000
Petani cengkeh	1 900 000
Tenaga kerja di pabrik rokok	164 000
Pengecer rokok/pedagang asongan	1 150 000
Percetakan dan transportasi	900 000
Total	6 414 000

PERMASALAHAN AGRIBISNIS TEMBAKAU

Seperti halnya dengan komoditas lainnya, agribisnis tembakau mengalami kendala-kendala dalam pengembangannya. Secara umum, permasalahan dalam agribisnis tembakau dapat digolongkan menjadi dua aspek, yaitu yang menyangkut masalah lingkungan eksternal, *on-farm* (teknis), dan masalah *off-farm* (nonteknis).

Masalah Teknis (*on-farm constrain*)

Permasalahan teknis adalah permasalahan yang banyak dihadapi oleh petani di lapang, sehingga produksi dan mutu tembakau yang dihasilkan belum dapat dimaksimalkan. Kendala-kendala di lapang tersebut adalah belum tepatnya waktu tanam yang dilakukan petani, sehingga gangguan curah hujan yang berlebihan pada saat tembakau di lapang atau pada saat prosesing sangat merugikan

petani. Selain itu masih terbatasnya benih bermutu untuk varietas unggul, menyebabkan pertanaman tembakau petani kurang tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tembakau adalah tanaman yang spesifik lokasi, sehingga pemilihan lahan yang sesuai untuk memperoleh hasil dan mutu tinggi sangat menentukan keberhasilan agribisnis tembakau. Namun demikian pemilihan lahan penanaman tembakau masih dilakukan pada lahan-lahan yang kurang sesuai, misalnya pada lahan dengan kandungan klor tinggi penyebab rendahnya daya bakar, sehingga sangat menurunkan mutu tembakau. Kendala berikutnya adalah belum diterapkannya baku teknis budi daya, seperti pengairan dan pemupukan, yang menyebabkan produksi dan mutu masih rendah. Akhirnya masih banyak ditemui, penanaman tembakau dilakukan pada lahan-lahan dengan kemiringan lebih dari 30%, sehingga menyebabkan erosi dan degradasi lahan.

Masalah Nonteknis (*off-farm*)

Masalah nonteknis agribisnis tembakau sangat mempengaruhi kebutuhan produksi dan mutu tembakau yang dihasilkan oleh petani. Contohnya adalah adanya kampanye antirokok sangat mempengaruhi produksi rokok, yang pada akhirnya akan mengurangi kebutuhan tembakau yang dihasilkan petani. Termasuk dalam hal ini adalah pergeseran selera konsumen ke jenis rokok yang berasa “ringan”/*mild*, menyebabkan beralihnya permintaan tembakau yang memberi rasa “berat” (seperti tembakau temanggung) ke tembakau yang lebih rendah kadar nikotinnya (tembakau madura). Penurunan harga tembakau dapat terjadi karena kurang patuhnya petani pada SK Bupati/SK Gubernur tentang informasi permintaan dan penawaran tembakau. Akhir-akhir ini petani juga menghadapi kelangkaan dan meningkatnya harga bahan bakar minyak tanah (BBMT) yang sangat dibutuhkan oleh petani tembakau virginia dalam prosesingnya. Sedangkan masalah pencampuran tembakau banyak dilakukan oleh pelaku usaha agribisnis dalam usa-

ha untuk meningkatkan pendapatannya. Cara-cara ini akan menurunkan harga tembakau, yang pada akhirnya petani sendiri yang akan menanggung akibatnya.

KEBIJAKAN PENANGULANGAN PERMASALAHAN

Strategi untuk menanggulangi permasalahan dilakukan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan, yang meliputi kebijakan dasar dan operasional.

Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar diarahkan untuk mengatur atau memfasilitasi pengembangan jenis-jenis tembakau berdasarkan kegunaannya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan tersebut difokuskan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut permasalahan tembakau virginia (bahan baku rokok putih), tembakau rakyat (bahan baku rokok keretek), tembakau impor (burley, oriental), dan tembakau bahan baku cerutu (deli, besuki NO, vorstenlanden).

1. Tembakau Virginia

Agribisnis tembakau virginia berkembang dengan baik bila dilakukan melalui pola kemitraan yang bersifat mutualistik antara petani dan pengelola tembakau/industri rokok. Pada saat ini pola kemitraan yang berjalan baik terjadi di Lombok, meskipun masih diperlukan dukungan kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan pertembakauan.

2. Tembakau Rakyat

Selama ini pengembangan agribisnis tembakau rakyat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain adalah belum terbentuknya pola kemitraan yang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu diperlukan bantuan dukungan pemerintah daerah dalam hal:

1. Perencanaan produksi,

2. Penyediaan varietas unggul dan benih bermutu unggul, dan pelatihan-pelatihan (teknis, pasca panen/mutu),
3. Pengembangan model *franchise* antara lembaga petani atau koperasi dengan perusahaan rokok,
4. Fasilitasi sistem pertanian konservasi pada lahan-lahan yang telah mengalami degradasi (misalnya areal tembakau di sekitar Gunung Sindoro dan Sumbing).

3. Tembakau Impor

Industri rokok di dalam negeri masih membutuhkan jenis-jenis tembakau dengan karakteristik aroma atau rasa tertentu, seperti tembakau burley, oriental, dan virginia. Tembakau-tembakau tersebut masih belum dapat dikembangkan secara optimal di wilayah agroekologis Indonesia. Uji-uji multilokasi untuk kesesuaian jenis-jenis tembakau tersebut masih perlu untuk terus dilakukan.

4. Tembakau Bahan Baku Cerutu (Deli, Besuki NO, Vorstenlanden)

Tembakau bahan cerutu yang berkembang di Indonesia sangat membutuhkan wilayah-wilayah agroekologis spesifik, seperti daerah Deli untuk tembakau deli, Jember untuk tembakau besuki NO, dan Klaten untuk tembakau vorstenlanden. Kebijakan yang mengarah perlindungan wilayah geografis (UU no. 18 tahun 2004) sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan agribisnis tembakau bahan cerutu.

Kebijakan Operasional

Dalam usaha mengembangkan agribisnis tembakau, maka diperlukan juga kebijakan-kebijakan yang bersifat operasional. Kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan untuk mendukung kegiatan peningkatan produksi dan mutu, dan kegiatan penyeimbangan penawaran-permintaan (*supply-demand*).

1. Peningkatkan Produktivitas dan Mutu

Dalam usaha peningkatan produksi dan mutu, maka hal-hal yang perlu segera dilakukan adalah:

- Pemetaan potensi wilayah tembakau
- Koordinasi dengan daerah untuk perencanaan areal
- Informasi iklim
- Pengadaan varietas unggul dan benih bermutu
- Peningkatan teknik budi daya/GAP
- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana
- Intensifikasi, diversifikasi usaha tani/rotasi tanaman
- Diversifikasi penggunaan energi alternatif dan kajian dampak lingkungannya
- Pengembangan jejaring kerja sama antar-*stake holders*
- Penguatan kelembagaan/peningkatan mutu SDM
- Pelatihan dan pendampingan
- Peningkatan penelitian oleh lembaga penelitian

2. Penyeimbangan *Supply-Demand*

Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha tani tembakau diperlukan informasi yang tepat tentang besarnya kebutuhan dari masing-masing jenis tembakau. Informasi tersebut sangat penting untuk menentukan besarnya areal tanam, sehingga akan terjadi keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan (*supply-demand*). Untuk menciptakan keseimbangan tersebut perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- Tembakau rakyat → perlu dibangun Forum Komunikasi Tembakau/Komisi Tembakau dengan melibatkan pabrik rokok, organisasi petani, dan pemerintah, contoh: Dewan Tembakau Provinsi Jawa Tengah.
- Pengembangan komoditas alternatif di wilayah tembakau *voor-oogst*, seperti kopi kate di Jateng (Sindoro/Sumbing) dan wijen di NTB.

LANGKAH OPERASIONAL

Selain dukungan kebijakan, maka langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan juga perlu diupayakan. Langkah-langkah operasional tersebut meliputi:

1. Diversifikasi Usaha Tani

Tanaman tumpang gilir/*intercropping* (misalnya wijen, jagung, pupuk hijau/*crotalaria*) terintegrasi dengan ternak, seperti di Jawa Tengah (2004–2006) dan di NTB (2005–2006). Diharapkan usaha-usaha ini akan bermanfaat, baik terhadap kesuburan lahan maupun ke peningkatan pendapatan petani. Manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari diversifikasi usaha tani antara lain adalah:

- a. memperbaiki struktur tanah
- b. meningkatkan daya saing
- c. meningkatkan pendapatan petani
- d. tidak tergantung pada satu komoditas
- e. dapat menjadi alternatif usaha tani tembakau

2. Diversifikasi Produk

Langkah ini diupayakan untuk memperoleh teknologi inovatif diversifikasi pemanfaatan hasil tembakau selain digunakan untuk rokok. Hal ini juga terkait dengan FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*). Dengan demikian tembakau mungkin juga dapat dimanfaatkan untuk pestisida atau obat nyamuk.

3. Bahan Bakar Alternatif untuk Prosesing Tembakau Virginia

Dengan semakin langkanya ketersediaan bahan bakar minyak tanah, maka diperlukan bahan bakar alternatif untuk memproses tembakau *virginia* menjadi kerosok. Pada saat ini dibutuhkan bahan bakar minyak tanah sebanyak 1,5–1,6 liter/1 kg tembakau kerosok. Bahan bakar alternatif yang tersedia adalah:

- gas elpiji (0,8 kg/1 kg tembakau kerosok)

- briket batu bara (3 kg/1 kg tembakau kerosok), telah dilakukan uji coba tahun 2000–2007 di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- biofuel (kelapa sawit dan jarak pagar)

4. Kemitraan (*Win Win Solution*)

Hubungan yang mutualistik antara petani dan pengelola/industri rokok adalah faktor yang penting dalam mendukung perkembangan agribisnis tembakau. Melalui sistem kemitraan yang mengadopsi konsep *win win solution*, maka kedua pihak yang bermitra akan memperoleh manfaat yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, pengelola tembakau akan dapat melakukan diseminasi teknologi-teknologi budi daya yang sesuai, untuk menghasilkan mutu yang diinginkan; sedangkan petani selain dapat meningkatkan hasil dan mutu sesuai teknologi anjuran, juga memperoleh manfaat kepastian harga produksinya.

POTENSI KE DEPAN INDUSTRI ROKOK NASIONAL

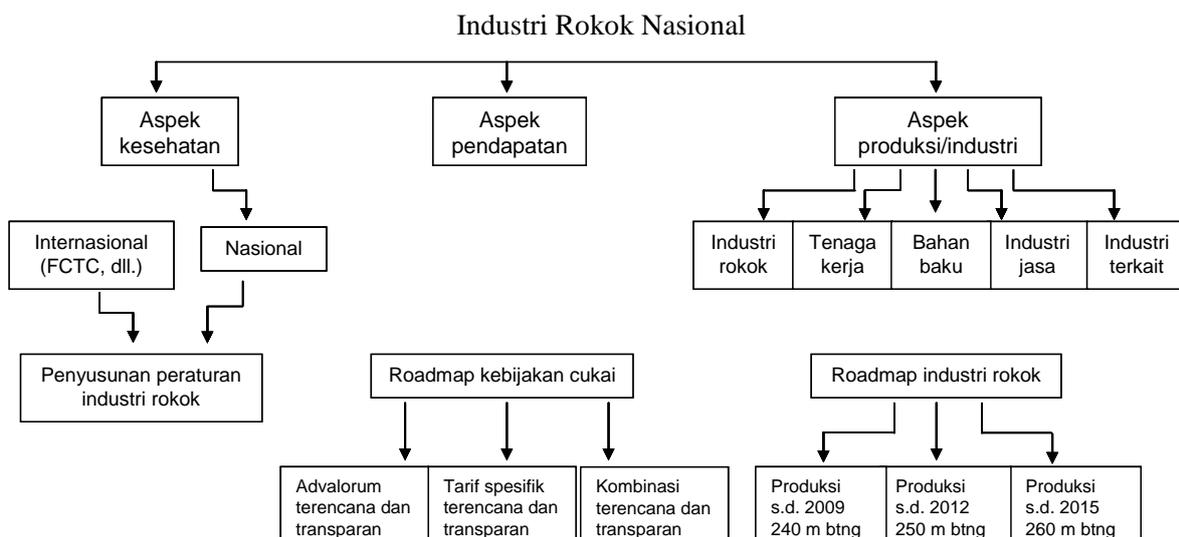
Tinjauan potensi industri rokok sangat penting untuk menentukan arah pengembangan dan

kebijakan yang akan diterapkan. Tinjauan potensi tersebut dapat dilakukan dengan bantuan *roadmap* berikut ini:

PEMBAHASAN

Diperlukan pengelompokan permasalahan pertembakauan agar dengan mudah mengidentifikasi solusinya:

1. Aspek biofisik merupakan masalah klasik, penelitian tidak pernah maju-maju tetap di tempat terus.
2. Masalah teknologi, menjadi tanggung jawab para teknokrat yang meliputi bagaimana kita menerobos batas, berpikir di luar kotak (*think out of the box*), bagaimana budi daya bisa dimodernisasi dalam pengertian aplikasi yang juga tetap sederhana, sistem panen, penanganan setelah itu (pascapanen), dan bagaimana teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Puslitbang Perkebunan, khususnya Balittas bisa secara efektif dan optimal bisa ditransfer kepada para petani contohnya *input* produksi yang paling banyak adalah pupuk, seharusnya pupuk hanya



diberikan separuhnya dengan produktivitas dan mutu tembakau yang sama. Efektivitas biaya dalam konteks efisiensi juga perlu dilihat, bagian teknis akan lebih paham bagaimana hal itu bisa dilakukan, batas mana yang dapat ditembus, dan batas mana yang memang wajib dibenahi.

3. Lahan dan kepemilikan lahan, ini juga masalah klasik. Tembakau dulu terkenal sebagai komoditas dengan nilai ekonomi tinggi tapi kemudian menjadi sebuah komoditas yang harus eksklusif. Hal ini perlu dipertanyakan, kenapa intensifikasi tidak berjalan dalam budi daya tembakau, secara angka pada komoditas yang lain termasuk kopi, kakao, karet, kita sudah mampu melakukan itu. Dengan demikian peningkatan efisiensi *input* produksi juga dengan peningkatan produktivitas.
4. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia dan Dirat Tansim menilai bahwa pemahaman petani terhadap tekno-ekonomi masih lemah. Penilaian ini perlu dipertanyakan, karena kemungkinan pemahaman petani terhadap tekno-ekonomi berbeda dengan pemahaman peneliti. Perlu diingat bahwa petani mempunyai insting yang tajam dalam menganalisa kondisi pasar. Hal ini perlu difasilitasi dengan kebijakan yang mendukung kondisi kerja sama yang kondusif antara petani dengan pihak industri dengan dilandasi oleh kepentingan untuk maju bersama-sama.
5. Kebijakan pemerintah tetap harus tegas, bila tembakau dianggap haram harus dicari komoditas penggantinya segera sehingga tidak mengurangi pendapatan petani dan negara (dari cukai). Ada kasus-kasus tertentu misalnya di Temanggung, petani tembakau hampir pada titik frustrasi, akhirnya diarahkan ke kopi robusta yang cukup baik. Namun demikian untuk memperoleh komoditas alternatif tersebut ada beberapa hal yang memang harus disesuaikan

dari kondisi-kondisi petani dan lingkungan bio-fisiknya.

Melihat kontribusi tembakau yang besar dan signifikan terhadap pendapatan negara, maka penanganan tembakau memang harus benar-benar secara serius. Diperlukan usaha-usaha yang fokus untuk menentukan pola pikir dan alur pikir yang jelas untuk dapat memilahkan permasalahan dan menentukan metode pemecahan masalah yang terkait dengan langkah-langkah operasional pemecahan masalah yang dihadapi. Ini menjadi suatu pegangan yang perlu diperhatikan bersama. Kemudian diperlukan sinkronisasi antara permasalahan dan kebijakan dengan langkah-langkah operasional penanganan tembakau, dengan demikian akan dihasilkan suatu kebijakan yang efektif dan efisien.

Dalam makalah PTPN X, belum disampaikan hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan peluang dan tantangan dalam agribisnis tembakau cerutu bagi pengembangan pertembakauan di Indonesia. Kerja sama antara produsen, konsumen, dan lembaga riset dengan fasilitasi pemerintah sangat penting dilakukan untuk membangun agribisnis tembakau yang kokoh. Hal ini penting dikemukakan dan harus disadari bahwa efek pengganda agribisnis tembakau (*multiplier effect*) lebih besar di hulu daripada di hilir (pabrik rokoknya). Oleh karena itu hal ini sangat strategis kalau dapat dikembangkan bentuk-bentuk kemitraan yang mengarah kepada peningkatan atau pencapaian tujuan bersama yang lebih baik.

Di dalam memahami perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut bergesernya konsumsi tembakau yaitu permintaan di negara-negara maju diperkirakan terus menurun dan di sisi lain permintaan meningkat di negara berkembang. Selain itu fenomena perusahaan multinasional yang mengalihkan investasi ke negara-negara berkembang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Indonesia termasuk 10 negara produsen tembakau dunia namun tidak termasuk 10 besar

pengekspor tembakau untuk konsumsi dalam negeri khususnya, kecuali ekspor tembakau cerutu Indonesia yang terkenal di pasar dunia. Saat ini di Eropa tembakau deli harganya 88 euro per kg. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah seharusnya memandang keistimewaan tembakau deli ini, sehingga kebijakannya dapat difokuskan untuk meningkatkan ekspor tembakau cerutu.

Selain itu yang perlu kita perhatikan pula adalah langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan dalam kaitannya dengan kita memformulasikan untuk pengembangan tembakau jangka panjang. Bagaimana pola pikir harus kita susun, apa saja yang menjadi target dari proses itu, maka kita bisa rumuskan bersama, tapi ujung-ujungnya jelas, bahwa kita harus menghasilkan atau menciptakan profil komoditas tembakau yang prima pada jangka waktu yang sudah kita sepakati. Katakanlah pada tahun 2020 atau tahun 2030 kita harus rancang semuanya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi.

Dalam alur pikir, kita bisa bagi dari aspek aspek *on farm*-nya di *off farm* terkait juga kebijakan pemerintah yang di dalamnya termasuk pemasaran dan perdagangan. Namun demikian perlu dikaitkan dengan apa yang ingin dicapai, tetap bahwa pada waktu yang telah disepakati kita harus dapat mencapai bagaimana Indonesia sebagai penghasil tembakau dan produk tembakau yang kompetitif di dunia. Hal itu dapat ditunjukkan oleh pendapatan petani yang tinggi, produktivitasnya tinggi, dan produknya berdaya saing tinggi.

Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah terobosan yang sifatnya tentu holistik, tidak bisa secara parsial, yaitu:

1. Membuka peluang pemanfaatan tembakau selain untuk rokok atau cerutu. Di bidang penelitian bioteknologi, tanaman tembakau sangat penting sama dengan tanaman tomat dalam kaitannya dengan pengujian transfer gen pada *genetic engineering* tanaman-tanaman.

2. *Allowable limit* yang dikaitkan dengan kesehatan, terus-menerus harus diuji bersama, dengan dukungan masalah ini tidak hanya berdasarkan provokasi atau hanya berdasarkan asumsi sepihak. Oleh karena itu tentu harus ada keihlasan untuk duduk bersama dan melakukan pekerjaan bersama-sama sampai dihasilkan satu hasil kesepakatan bersama yang benar-benar meyakinkan dalam menyikapi keterkaitan antara kebiasaan merokok dengan isu-isu kesehatan.
3. Peningkatan kualitas lahan juga harus diperhatikan dengan baik, karena kita tahu tembakau termasuk tanaman yang sangat intensif. Diperlukan secara terus-menerus program-program untuk pengkayaan dalam jangka panjang dari tanah-tanah yang ditanami tembakau.
4. Lembaga-lembaga riset harus difasilitasi. Bila mengacu pada cukai sebesar 42 triliun dihasilkan dari produk tembakau, maka kalau bisa 5% dana kembali ke riset tembakau merupakan hal yang luar biasa.
5. Sudah waktunya untuk membentuk Dewan Tembakau Indonesia/Nasional supaya dapat mengumpulkan semua *stake holder* termasuk pemerintah, untuk bersama-sama mengembalikan kejayaan petani tembakau di Indonesia.

DISKUSI

1. Ir. Sunarto (FTP UGM)

Pertanyaan:

- Apakah ada merokok membuat tambah sehat?

Jawab:

- Belum tahu keterkaitan antara tembakau dengan kanker.

2. Ir. Surachmad (BPSMB & LT Surabaya)

Pertanyaan:

- Sejauh mana RUU hak paten varietas tanaman telah diundangkan? Mohon beberapa varietas spesifik yang ada di beberapa daerah seperti

tembakau deli, vorstenland, besuki NO, dsb. agar diupayakan memperoleh hak paten, karena sejak beberapa tahun terakhir sudah diuji coba di negara lain. Diharapkan pemerintah pusat yang mengambil alih pengurusannya, jangan diserahkan ke daerah masing-masing.

Jawab:

- Hak paten varietas telah diundangkan dengan dibentuknya institusi dalam struktur organisasi Deptan (Pusat Perlindungan Varietas = PVT) yang menangani hal tersebut.

3. M. Koentjoro (Indonesian Tobacco Association, Jember)

Pertanyaan:

- Apakah pertembakauan di Indonesia akan tetap berkembang di masa mendatang?
- Usul pembentukan Dewan Tembakau yang disponsori oleh Deptan untuk mengantisipasi RUU pengendalian dampak produksi tembakau terhadap kesehatan

Jawab:

- Pertembakauan di Indonesia akan terus berkembang dengan mengikuti regulasi dan tanggap terhadap isu-isu nasional dan internasional terutama yang berkaitan dengan masalah kesehatan.
- RUU tentang dampak produksi tembakau terhadap kesehatan tidak dapat diatasi oleh Deptan sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya. Usaha mengatasi hal tersebut, Deptan menyertakan Deperindag, Depkes, dan Depkeu dalam penyusunan *roadmap* tembakau, dimana lokomotif dari *roadmap* tersebut adalah Departemen Perindustrian.

4. Ir. Sudarmadji Rahardjo, MS. (Fakultas Pertanian, UNRAM)

Pertanyaan:

- Dalam instrumen perkembangan 2007–2020 tidak nampak ada usaha tembakau organik meng-

ingat Deptan telah mencanangkan 2010 sebagai tahun dimulainya pertanian organik. Apakah tidak terpikir tembakau organik.

- Pemerintah sulit memberi subsidi bahan bakar minyak tanah untuk masyarakat. Petani di NTB selalu berusaha mendapatkan subsidi minyak tanah untuk omprongan. Ada alternatif bahan bakar untuk tembakau yaitu biofuel yang potensial, mengapa pemerintah tidak memberikan subsidi harga jarak pada petani, kalau harga jarak Rp500 per kg tidak ada yang ingin menanam. Tahun pertama sampai kesepuluh disubsidi, suatu saat petani bisa menyediakan minyaknya sendiri dari jarak untuk membakar tembakanya sendiri sehingga pemerintah melepas subsidi minyak tanah tidak ada masalah.

Jawab:

- Setuju dengan pengembangan pertanian organik, akan tetapi masing-masing tanaman membutuhkan kandungan-kandungan tertentu, terutama tembakau, tanaman yang mengedepankan kualitas.

5. Ir. Sahminudin (Petani NTB)

Pertanyaan:

- Sampai kapan pemerintah akan berstandar ganda dalam harga tembakau dan rokok. Di satu sisi pemerintah setiap tahun mengharapkan penerimaan negara dari cukai/PPN rokok terus bertambah, tetapi di sisi lain pemerintah menekan perkembangan dan pertumbuhan tembakau.
- Pemerintah masih bersifat diskriminasi dalam hal memberi subsidi. BUMN yang bangkrut (tidak bisa memberi kontribusi kepada negara), terus-menerus diberi subsidi, sementara kepada petani masih dipikir-pikir.
- Mengapa pemerintah masih tebang pilih menyikapi masalah. Hanya beberapa minggu harga minyak goreng naik, Mentan sudah membuat Dewan Minyak Goreng Indonesia dan langsung menterinya menjadi ketuanya. Tetapi dengan tembakau?

Jawab:

- Pemerintah setiap tahun ganti, mungkin masing-masing akan bisa menjawab, saya sendiri terus terang tidak bisa menjawab.
- Pemerintah sebenarnya tidak diskriminatif subsidi, mungkin cara pandang yang berbeda atau mungkin penentu kebijakan karena masing-masing departemen untuk koordinasi masih sulit, di Indonesia mungkin kebijakan Departemen A berbeda dengan kebijakan Departemen Pertanian.
- Kaitannya dengan Menteri Pertanian silakan kirim surat langsung ke Menteri Pertanian, saya tidak bisa menjawab.

6. Abdurrachman (Asosiasi Petani Tembakau Kasturi Jember dan KUTJ)

Pertanyaan:

- Tanam tembakau di Kabupaten Jember merupakan budaya baik na-oogst maupun voor-oogst, sehingga secara keseluruhan produksi tembakau rakyat cukup banyak, masalahnya adalah serapan pasar, harganya tidak sesuai dengan biaya produksi.
- Kebijakan pemerintah tidak menggambarkan harapan yang menjanjikan pada masa sekarang dan seterusnya karena:
 - a. Adanya PP No 19/2003.
 - b. Upaya pemerintah setiap tahun menaikkan cukai.
 - c. Adanya provinsi yang menerapkan peraturan pembatasan area merokok dengan peraturan daerah/perda.
 - d. Adanya tekanan dari FCTC.
 - e. Pernyataan Mentan yang menganggap tembakau haram, tapi cukai tetap berjalan.

Jawab:

- Perda silakan saja cuma kami dari sisi pemerintah, maaf mungkin kita duduknya berbeda, cara pandangnya berbeda. Kami di pusat melihatnya secara nasional tidak bisa melihat secara lokal, misal mungkin bagaimana di Jember atau

mungkin bagaimana di kabupaten lain. Contoh di Jatim pada protes kenapa HPP gula Rp4.900 maunya Rp5.300, dari penelitian tim studi kalau HPP dinaikkan Rp5.300, ada starter pemerintah jangan sampai harga gula melebihi Rp6.300, produsen gula kalau dilihat dari luasan ada 400 ribu hektar, rata-rata satu orang per hektar berarti ada 400 ribu orang, sementara konsumennya penduduk yang sangat besar, ini salah satu faktornya, begitu juga komoditas lainnya, jadi tidak bisa melihat hanya secara lokal harus begini, tetapi secara nasional kemudian dampak terhadap konsumen lainnya.

- Indonesia salah satu negara di Asean yang belum menandatangani FCTC, ini merupakan *supporting* bahwa pemerintah mendukung supaya jangan sampai merugikan *stake holder* pertembakauan.
- Saya tidak tahu kenapa begitu.
- Bagaimana untuk membeli tembakau rakyat yaitu dengan cara mengatur *supply* dan *demand* karena tembakau rajangan atau tembakau rakyat sangat sulit, tembakau rakyat ini distribusinya sangat besar, lain dengan tembakau virginia atau tembakau lainnya yang kemitraannya sudah ada sehingga pasarnya sudah jelas, tetapi kalau tembakau rakyat, namun pemerintah mencoba, kemitraan yang ada kita bangun, kemudian dengan adanya perda-perda masing-masing daerah kita setuju, tetapi maaf cara berpikir produsen dalam arti petani, kalau harga tinggi ramai-ramai menanam tetapi tidak melihat kebutuhan pabrikan. Kita harapkan ini harus ada perencanaan yang baik, dalam arti koordinasi informasi antara petani melalui APTI dengan pengelola. Misal di Jawa Tengah perlu berapa ton sehingga arealnya hanya segitu saja, jangan menanam melampaui itu. Maaf ini juga sebagai informasi, kenapa Bpk. Mentan kali pertama jadi menteri ada statemen kurang bagus. Saat itu ada informasi di surat kabar Jawa Tengah

bahwa ada tembakau tidak dibeli pabrikan, akhirnya tembakau tersebut dibuang di jalan, bahkan gudang pabrikan akan dibakar, sehingga menurut beliau tembakau kurang bagus. Tetapi sampai sekarang kalau ada kemitraan yang baik, petani produknya dibeli dengan jelas dengan kemitraan *win-win solution*, beliau tidak masalah. Oleh karena itu dengan adanya kerja sama dengan perindustrian dan perdagangan sangat membantu Ditjenbun bagaimana meningkatkan pertembakauan kita.

7. Drs. Lalu Hatman (APTI Lombok Timur, NTB)

Pertanyaan:

- Bahan bakar minyak omprongan tembakau (BBMOT) pada tahun 2007 belum jelas, mohon kejelasan tentang BBMOT.
- BBMOT dari tahun 2007 terus akan dikurangi oleh pemerintah dan pada akhirnya di tahun 2010 BBMOT sudah habis, apa kira-kira solusi tentang BBMOT pengganti.
- Pola kemitraan yang ada di Pulau Lombok (NTB) yang terbaik tetapi pada pelaksanaannya masing-masing perusahaan pengelola beda-beda penerapan terhadap petani binaannya. Perlu ada standarisasi kemitraan.
- Grade di masing-masing perusahaan pengelola beda-beda. Sebaiknya grade pakai SNI diterapkan di Pulau Lombok (NTB).

Jawab:

- Yang menentukan subsidi BBMOT adalah Menkeu bukan Mentan.
- Subsidi dikurangi adalah kesepakatan. Kita sedang mencari alternatif bahan bakar lain, misal Balittas sedang meneliti bagaimana kalau omprongan menggunakan bahan bakar batu bara. Jarak pagar pun dikembangkan di NTB ada masalah harga yang masih Rp500 per kg, ini belum fisibel karena produktivitasnya masih rendah yaitu 5 ton/ha, jarak pagar baru fisibel kalau hasilnya 9 ton/ha. Jangan menyarankan pe-

tani menanam jarak pagar di lahan subur, jangan mengganti lahan yang sudah ada tanamannya dengan jarak pagar. Jarak pagar disarankan ditanam di lahan marginal, baru menguntungkan.

- Pola kemitraan di Indonesia, NTB adalah terbaik untuk tembakau virginia, oleh karena itu kita coba menerapkan pola tersebut untuk provinsi atau daerah lain.
- Sementara ini *grade* ditentukan berdasarkan ciunan dan pengalaman *grader*, cara organoleptik ini menyebabkan bias. Mudah-mudahan pengelola di NTB bisa bersama-sama menstandarkan *grade*.

8. Slamet Subari (Univ. Trunojoyo, Bangkalan)

Pertanyaan:

- Fenomena turunnya harga tembakau madura disebabkan karena banyaknya tembakau jawa yang masuk ke Madura. Bagaimana mengatasi hal ini?

Jawab:

- Sudah ada perda tetapi belum jalan sepenuhnya. Kasus seperti itu sama dengan di Jawa Tengah, tembakau dari Klaten atau kabupaten lain masuk ke Temanggung dan menurunkan mutu tembakau temanggung. Pernah pada waktu panen dijaga bagian *stoper* tetapi prakteknya tidak berhasil karena bisnis adalah bisnis merupakan *profit oriented*. Jadi masing-masing provinsi atau kabupaten mensiasati dengan caranya sendiri.

9. Moesamto (Saprotan Utama)

Pertanyaan/Saran:

- Selama ini kebijakan dan pengembangan lebih ditujukan pada tembakau virginia FC dan cerutu, sedangkan tembakau rajangan masih kurang, sedangkan porsi tembakau rajangan di Indonesia 60–70%, tapi pengembangan tembakau rajangan belum mendapat kepedulian yang cukup.

- Apa ke depan kepedulian pengembangan tembakau rajangan akan mendapat porsi yang lebih? Siapakah yang memegang peran/dominasi dalam pengembangan?
- Usul: Melibatkan penuh industri rokok dan pedagang tembakau, melalui sistem kemitraan industri-pedagang-petani.

Jawab:

- Kemitraan tembakau rajangan sudah kita lakukan melalui pelatihan, adanya perda, lewat kelompok melakukan diversifikasi usaha. Tujuannya merangkul petani-petani rajangan di masing-masing kabupaten.
- Yang bertanggung jawab kita semua

10. Mudzakir (Asosiasi Petani Tembakau Rajangan Kab. Probolinggo)

Pertanyaan:

- Apakah tidak ada cara lain untuk menambah pendapatan negara kecuali selalu menaikkan cukai rokok?

- Kapan pemerintah ada keberpihakan yang serius kepada petani tembakau?

Jawab:

- Kebijakan pemerintah berpihak pada petani terutama Departemen Pertanian. Hanya saja masing-masing departemen punya prioritas. Misalnya di Ditjenbun tembakau bukan prioritas utama sehingga anggaran yang dialokasikan ke tembakau tidak sebesar tebu karena saat ini tebu merupakan prioritas utama, prioritas kedua kapas. Meski demikian pemerintah tetap mendukung pengembangan tembakau.